



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1 / 7 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA GABUNGAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA
MEMBAHAS PERMOHONAN PERSETUJUAN MEMORANDUM SALING
PENGERTIAN PENYELENGGARAAN GRAND PRIX MOTOCROSS
MXGP OF ASIA 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Permohonan Persetujuan Memorandum Saling Pengertian Penyelenggaraan Grand Prix Motocross MXGP Of Asia 2019, dipandang perlu menunjuk Pimpinan dan Anggota Gabungan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang untuk membahas Persetujuan Memorandum Saling Pengertian dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Gabungan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Rangka Membahas Permohonan Persetujuan Memorandum Saling Pengertian Penyelenggaraan Grand Prix Motocross MXGP Of Asia 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
16. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Gabungan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Rangka Membahas Permohonan Persetujuan Memorandum Saling Pengertian Penyelenggaraan Grand Prix Motocross MXGP Of Asia 2019.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Gabungan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Gabungan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membahas Permohonan Persetujuan Memorandum Saling Pengertian Penyelenggaraan Grand Prix Motocross MXGP Of Asia 2019.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 11 Juni 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA,


SUPRIYADI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Para Kepala Badan Kota Semarang;
9. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
10. Para Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
11. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG
 Nomor 172.1/ 7 Tahun 2019
 TENTANG
 SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
 GABUNGAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS
 PERMOHONAN PERSETUJUAN MEMORANDUM
 SALING PENGERTIAN PENYELENGGARAAN
 GRAND PRIX MOTOCROSS MXGP OF
 ASIA 2019

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA GABUNGAN ALAT KELENGKAPAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA
 MEMBAHAS PERMOHONAN PERSETUJUAN MEMORANDUM
 SALING PENGERTIAN PENYELENGGARAAN GRAND PRIX MOTOCROSS
 MXGP OF ASIA 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	H. Supriyadi, S.Sos, MA	Ketua
2.	H. Joko Santoso, SE, MM	Wakil Ketua
3.	H. Wiwin Subiyono, SH	Wakil Ketua
4.	H. Agung Budi Margono, ST, MT	Wakil Ketua
5.	Drs. H. Agus Riyanto Slamet	Anggota
6.	Danur Rispriyanto	Anggota
7.	Joko Susilo	Anggota
8.	Hanik Khoiru Solikah, SE	Anggota
9.	Hj. Hesty Wahyuningsih	Anggota
10.	Mualim, S.PD, MM	Anggota
11.	H. Ari Purbono, SE	Anggota
12.	Adiarto Suryo Kusumo, SH, M.Kn	Anggota
13.	H. Agung Priyambodo, SE, ST	Anggota

14.	Nabila	Anggota
15.	H. Syahrul Qirom, ST	Anggota
16.	Laser Narindro, ST	Anggota
17.	Hj. Umi Surotud Diniyah, SE	Anggota
18.	HM. Rukiyanto, AB. SH	Anggota
19.	V. Joko Riyanto, SE	Anggota
20.	Dyah Ratna Harimurti, S.Sos	Anggota
21.	dr. Wilujeng Riningrum	Anggota
22.	H. Sugi Hartono, S.Sos, I	Anggota
23.	Fris Dwi Yulianto, S.Pi	Anggota
24.	Evi Rahmawati, SPd.I	Anggota
25.	DR. H. Anang Budi Utomo, S.Pd, S.Mn, M.Pd	Anggota
26.	H. Moh Rohaini	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA,



SUPRIYADI